



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN KEUANGAN

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**TAHUN 2021
(A U D I T E D)**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMASRAYA
JALAN PESANGGERAHAN, JORONG SUNGAI KILANGAN NAGARI SUNGAI
DAREH KECAMATAN PULAU PUNJUNG**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas selesainya penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, penyelesaian sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu kunci keberhasilannya. Didalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi manakala transparansi dan akuntabilitas menjadi ukurannya. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat didalam ruang entitas pelaporan tersebut, yakni "Pemerintah". Laporan Keuangan yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi mampu menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai Pendapatan, Beban, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Disamping fungsi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi dapat menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak sesuai kepentingan masing-masing, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat dan akuntabel. Hal ini dikarenakan sebagai produk akhir sistem akuntansi, laporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, laporan keuangan yang harus disusun oleh Kepala Daerah sesuai dengan pasal 320 ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan

ekuitas dan, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dalam Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 berusaha semaksimal mungkin untuk mengacu kepada ketentuan tersebut, walaupun masih memerlukan beberapa penyempurnaan.

Kekurangan atau kelemahan atas penyajian laporan keuangan mungkin saja terjadi, karenanya koreksi dan masukan yang bermanfaat sangat kami butuhkan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dimasa selanjutnya.

Demikianlah Laporan Keuangan ini disampaikan Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pulau Punjung, 31 Desember 2021



BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si

Revisi Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19820521 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan : 01. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 01.06. Sosial
Unit Organisasi : 1.06.1.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.06.1.06.01.0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020 (AUDITED)
4	PENDAPATAN - LRA	-	-	-	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	-	-	-	-
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-	-	-
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	-	-	-	-
5	BELANJA	9.226.434.950,00	9.063.998.424,00	98,24	9.004.522.985,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.128.734.950,00	7.981.068.424,00	98,18	8.115.183.985,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.558.201.000,00	2.471.559.223,00	96,61	3.807.912.415,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.570.533.950,00	5.509.509.201,00	98,90	4.307.271.570,00
5.2	BELANJA MODAL	1.097.700.000,00	1.082.930.000,00	0,00	889.339.000,00
5.2.1	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
5.2.2	Peralatan dan Mesin	606.700.000,00	592.840.000,00	0,00	889.339.000,00
5.2.3	Gedung dan Bangunan	491.000.000,00	490.090.000,00	0,00	-
5.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
5.2.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.226.434.950,00)	(9.063.998.424,00)	98,24	(9.004.522.985,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.226.434.950,00)	(9.063.998.424,00)	98,24	(9.004.522.985,00)

Pulau Punjung, 31 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN



BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
 NIP. 19820521 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 01.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 01.06.	Sosial
Unit Organisasi	: 1.06.1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi	: 1.06.1.06.01.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA 01

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI TAHUN 2020 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	-	-	-	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan	-	-	-	-
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	-	-	-	-
4.1.2.13	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	-	-	-	-
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	-	-	-	-
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	-	-	-	-
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	-	-	-	-
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-	-	-
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	-	-	-	-
4.1.4.19.02	Pengelolaan air minum - LRA	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
5	BELANJA	9.226.434.950,00	9.063.998.424,00	98,24	9.004.522.985,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.128.734.950,00	7.981.068.424,00	98,18	8.115.183.985,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.558.201.000,00	2.471.559.223,00	96,61	3.807.912.415,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.558.201.000,00	2.471.559.223,00	96,61	3.807.912.415,00
5.1.1.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.343.662.000,00	1.312.582.600,00	97,69	1.888.823.054,00
5.1.1.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.886.000,00	115.430.272,00	96,28	-
5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	199.070.000,00	193.010.000,00	96,96	-
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-	-
5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.535.000,00	19.050.000,00	88,46	-
5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.006.000,00	72.709.680,00	95,66	-
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.432.000,00	2.397.303,00	69,85	-
5.1.1.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000,00	20.082,00	87,31	-
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.480.000,00	74.575.829,00	91,53	-
5.1.1.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.926.000,00	1.911.920,00	65,34	-
5.1.1.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.280.000,00	5.735.820,00	69,27	-
5.1.1.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-	-	-
5.1.1.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.014.000,00	3.981.827,00	66,21	-
5.1.1.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-	-	-
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	576.937.000,00	556.603.890,00	96,48	898.439.361,00
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	118.950.000,00	113.550.000,00	95,46	1.020.650.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.570.533.950,00	5.509.509.201,00	98,90	4.307.271.570,00
5.1.2.01	Belanja Barang	1.306.192.750,00	1.303.849.928,00	99,82	1.455.275.312,00
5.1.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.192.750,00	1.303.849.928,00	99,82	1.455.275.312,00
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	107.039.850,00	106.576.078,00	99,57	111.756.500,00
5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-lai Tabung Gas	680.000,00	660.000,00	97,06	-
5.1.2.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	32.800.000,00	32.641.500,00	99,52	1.175.000,00
5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	93.199.808,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	59.037.300,00	58.750.250,00	99,51	132.672.700,00
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.250.000,00	40.250.000,00	100,00	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.563.600,00	37.563.100,00	100,00	441.410.700,00
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.998.000,00	7.990.000,00	99,90	10.215.000,00
5.1.2.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	20.457.000,00	20.457.000,00	100,00	-
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.998.500,00	6.992.000,00	99,91	1.500.000,00
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.960.000,00	3.939.000,00	99,47	7.999.604,00
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	22.402.500,00	21.740.000,00	97,04	-
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Disehkan kepada Masyarakat	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	8.600.000,00
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	484.750.000,00	484.750.000,00	100,00	216.350.000,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	449.580.000,00	448.891.000,00	99,85	250.846.000,00
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.476.000,00	3.450.000,00	99,25	12.450.000,00
5.1.2.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	167.100.000,00
5.1.2.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.2.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	-	-	-	-
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.883.413.200,00	1.836.723.134,00	97,52	2.238.742.812,00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.847.198.700,00	1.800.777.134,00	97,49	2.176.796.012,00
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.700.000,00	17.300.000,00	73,00	629.750.000,00
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	450.000,00	-	0,00	-
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	684.554.700,00	670.487.100,00	97,94	-
5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	96.800.000,00	96.800.000,00	100,00	1.444.078.000,00
5.1.2.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI TAHUN 2020 (AUDITED)
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	543.050.000,00	543.050.000,00	100,00	-
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	96.800.000,00	93.600.000,00	96,69	-
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.160.000,00	27.000.000,00	92,59	-
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	80.160.000,00	80.160.000,00	100,00	-
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	-
5.1.2.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.500.000,00	7.000.000,00	66,67	-
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Likwidasi, Film, dan Pemotretan	66.352.000,00	66.230.000,00	99,82	-
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	57.270.000,00	54.437.536,00	95,05	46.478.784,00
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	79.800.000,00	70.173.648,00	87,94	43.829.228,00
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	-	460.000,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Penitriman	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.800.000,00	15.738.850,00	79,49	12.200.000,00
5.1.2.02.01.0068	Belanja Rukhmiting Penerangan Jalan Umum	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	-	-	-	-
5.1.2.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-	-	-	-
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	-	-	-	-
5.1.2.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-
5.1.2.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	-	-	-	-
5.1.2.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	-	-	-	-
5.1.2.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	-	-	-	-
5.1.2.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	-	-	-	-
6.1.2.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	28.000.000,00
5.1.2.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Peningkat	-	-	-	-
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	-	-	-	-
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	-
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	28.000.000,00
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	-	-	-	-
5.1.2.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-
5.1.2.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	-	-	-	-
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.800.000,00	7.750.000,00	99,36	14.050.000,00
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	8.750.000,00
5.1.2.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	5.800.000,00	5.750.000,00	99,14	-
5.1.2.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-	-	-	1.300.000,00
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.550.000,00	24.330.000,00	99,10	-
5.1.2.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.730.000,00	14.510.000,00	98,51	-
5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	-	-	-	-
5.1.2.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	-	-	-	-
5.1.2.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	-	-	-
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.820.000,00	9.820.000,00	100,00	-
5.1.2.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Penawar Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	-	-	-	-
5.1.2.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	-	-	-	-
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non-Konstruksi	-	-	-	-
5.1.2.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	-	-	-
5.1.2.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	-	-	-	-
5.1.2.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-	-	-	-
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.866.500,00	3.866.000,00	99,99	19.896.800,00
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.866.500,00	3.866.000,00	99,99	-
5.1.2.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	-	-	-	-
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	19.896.800,00
5.1.2.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-
5.1.2.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	147.670.000,00	142.389.179,00	96,42	134.322.136,00
5.1.2.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-
5.1.2.03.01.0002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-	-	-
5.1.2.03.01.0027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Bersejarah	-	-	-	-
5.1.2.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	-	-	-	-
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147.670.000,00	142.389.179,00	96,42	16.250.000,00
5.1.2.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.500.000,00	17.499.753,00	100,00	-
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000,00	84.990.426,00	94,43	-
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.000.000,00	31.829.000,00	99,47	-
5.1.2.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00	-
5.1.2.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Peralengkapan Kantor	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-	-	16.250.000,00
5.1.2.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.000.000,00	98,36	-
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	118.072.136,00
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	118.072.136,00
5.1.2.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-	-	-
5.1.2.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-	-	-
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	-	-	-	-
5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan- Jalan Kabupaten	-	-	-	-
5.1.2.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Penyeberangan	-	-	-	-
5.1.2.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk, Irigasi	-	-	-	-
5.1.2.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	-	-	-	-
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.233.258.000,00	2.226.546.960,00	99,70	478.931.310,00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.233.258.000,00	2.226.546.960,00	99,70	478.931.310,00
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	824.658.000,00	823.896.960,00	99,91	341.581.310,00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.406.500.000,00	1.401.750.000,00	99,66	137.350.000,00
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.100.000,00	900.000,00	42,86	-
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-	-
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-
5.1.2.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	-	-	-
5.1.2.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-	-	-	-
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	-
6.1.2.06	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI TAHUN 2020 (AUDITED)
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-
5.1.2.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
5.1.2.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	8.128.734.950,00	7.981.068.424,00	98,18	8.115.183.985,00
5.2	BELANJA MODAL	1.097.700.000,00	1.082.930.000,00	98,65	889.339.000,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.1.13	Belanja modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	-	-	-	-
5.2.1.13.09	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606.700.000,00	592.840.000,00	97,72	860.539.000,00
5.2.2.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	-	-	-	-
5.2.2.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	-	-	-	-
5.2.2.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	-	-	-	-
5.2.2.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	-
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	745.195.000,00
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-	-	-	2.000.000,00
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	8.900.000,00
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	-	-
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	4.599.000,00
5.2.2.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	-	-	-	-
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	-	-	-	-
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	203.500.000,00	199.650.000,00	98,11	94.385.000,00
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	-
5.2.2.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	-	5.460.000,00
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	354.200.000,00	344.190.000,00	97,17	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491.000.000,00	490.090.000,00	99,81	-
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	491.000.000,00	490.090.000,00	99,81	-
5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	-	-	-	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5.2.4.02.05.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	28.800.000,00
5.2.5.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	-	-	-	-
5.2.5.01.01.0008	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	-	-	-	-
5.2.5.01.01.0010	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	-	-	-	-
5.2.5.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	-	-	-	-
5.2.5.02.02.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	-	-	-	-
5.2.5.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	-	-	-	-
5.2.5.05.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-
5.2.5.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
5.2.5.08.01.0005	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	-	-	-	-
5.2.5.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	-	-	-	-
5.2.5.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	-	-	-	28.800.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
5.3.1.01.01	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	9.226.434.950	9.063.998.424	98,24	9.004.522.985
	TRANSFER	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	9.226.434.950	9.063.998.424	98,24	9.004.522.985
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(9.226.434.950,00)	(9.063.998.424,00)	98,24	(9.004.522.985,00)
	PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI	(9.226.434.950,00)	(9.063.998.424,00)	98,24	(9.004.522.985,00)
	KOREKSI SILPA	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SETELAH KOREKSI	(9.226.434.950,00)	(9.063.998.424,00)	98,24	(9.004.522.985,00)

Pulau Punjung, 31 Desember 2021

PENGUNA ANGGARAN



BOBYP RIZA, S.STP, M.Si

NIP. 19820521 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 01. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 01.06. Sosial
 Unit Organisasi : 1.06.1.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
 Sub Unit Organisasi : 1.06.1.06.01.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Akun	URAIAN	2021	2020 (AUDITED)	Kenaikana/Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN	706.342.801,00	1.579.825.267,20	(873.482.466,20)	(55,29)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.579.825.267,20	-	-
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
8.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	706.342.801,00	1.579.825.267,20	-	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	636.342.801,00	1.579.825.267,20	-	-
	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	70.000.000,00	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	JUMLAH PENDAPATAN	706.342.801,00	1.579.825.267,20	(873.482.466,20)	(55,29)
	BEBAN	9.056.370.522,85	27.839.765.092,18	(1.052.824.569,33)	(3,78)
	Beban Pegawai	2.471.559.223,00	3.807.912.415,00	(1.336.353.192,00)	(35,09)
8.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan				
8.1.1.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.312.582.600,00	1.888.823.054,00	(576.240.454,00)	(30,51)
8.1.1.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	115.430.272,00	-	115.430.272,00	-
8.1.1.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	193.010.000,00	-	193.010.000,00	-
8.1.1.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-	-
8.1.1.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.050.000,00	-	19.050.000,00	-
8.1.1.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	72.709.680,00	-	72.709.680,00	-
8.1.1.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.397.303,00	-	2.397.303,00	-
8.1.1.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	20.082,00	-	20.082,00	-
8.1.1.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	74.575.829,00	-	74.575.829,00	-
8.1.1.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.911.920,00	-	1.911.920,00	-
8.1.1.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.735.820,00	-	5.735.820,00	-
8.1.1.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-	-	-
8.1.1.01.12.0001	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.981.827,00	-	3.981.827,00	-
8.1.1.01.12.0002	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-	-	-
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
8.1.1.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	556.603.890,00	898.439.361,00	(341.835.471,00)	(38,05)
8.1.1.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	113.550.000,00	1.020.650.000,00	(907.100.000,00)	(88,87)
9.1.2	Beban Persediaan	1.261.078.028,00	1.436.636.712,00	(175.558.684,00)	(12,22)
8.1.2.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	106.576.078,00	111.756.500,00	(5.180.422,00)	(4,64)
8.1.2.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	660.000,00	-	660.000,00	-
8.1.2.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.306.000,00	1.175.000,00	8.131.000,00	692,00
8.1.2.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	93.199.808,00	(93.199.808,00)	(100,00)
8.1.2.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.010.250,00	133.093.700,00	(74.083.450,00)	(55,66)
8.1.2.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
8.1.2.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.900.350,00	441.344.450,00	(403.444.100,00)	(91,41)
8.1.2.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.054.000,00	10.146.000,00	(2.092.000,00)	(20,62)
8.1.2.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.457.000,00	-	20.457.000,00	-
8.1.2.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.992.000,00	1.500.000,00	5.492.000,00	366,13
8.1.2.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.939.000,00	7.999.604,00	(4.060.604,00)	(50,76)
8.1.2.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	21.740.000,00	-	21.740.000,00	-
8.1.2.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	3.659.500,00	-	3.659.500,00	-

Kode Akun	URAIAN	2021	2020 (AUDITED)	Kenaikana/Penurunan	%
8.1.2.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.200.000,00	-	15.200.000,00	-
8.1.2.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	471.242.850,00	206.025.650,00	265.217.200,00	128,73
8.1.2.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	448.891.000,00	250.846.000,00	198.045.000,00	78,95
8.1.2.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.450.000,00	12.450.000,00	(9.000.000,00)	(72,29)
8.1.2.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	167.100.000,00	(167.100.000,00)	(100,00)
8.1.2.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	-
8.1.2.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
8.1.2.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	-	-	-	-
	Beban Persediaan Dana BLUD - LO				
	Beban Persediaan Dana BOS - LO				
9.1.2	Beban Jasa	1.828.973.134,00	2.196.692.812,00	(367.719.678,00)	(16,74)
8.1.2.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.300.000,00	629.750.000,00	(612.450.000,00)	(97,25)
8.1.2.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
8.1.2.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	670.487.100,00	-	670.487.100,00	-
8.1.2.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	96.800.000,00	1.444.078.000,00	(1.347.278.000,00)	(93,30)
8.1.2.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	543.050.000,00	-	543.050.000,00	-
8.1.2.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	93.600.000,00	-	93.600.000,00	-
8.1.2.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
8.1.2.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	27.000.000,00	-	27.000.000,00	-
8.1.2.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	80.160.000,00	-	80.160.000,00	-
8.1.2.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
8.1.2.02.01.0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
8.1.2.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	-	-	-
8.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	-	19.896.800,00	-	-
8.1.2.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.510.000,00	-	14.510.000,00	-
8.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.820.000,00	-	9.820.000,00	-
8.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.866.000,00	-	3.866.000,00	-
8.1.2.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	66.230.000,00	-	66.230.000,00	-
8.1.2.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	54.437.536,00	46.478.784,00	7.958.752,00	-
8.1.2.02.01.0060	Beban Tagihan Air	-	-	-	-
8.1.2.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	70.173.648,00	43.829.228,00	26.344.420,00	-
8.1.2.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	460.000,00	(460.000,00)	-
8.1.2.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.738.850,00	12.200.000,00	3.538.850,00	-
	Beban Sewa	7.750.000,00	42.050.000,00	(34.300.000,00)	(74,06)
8.1.2.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
8.1.2.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
8.1.2.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	10.050.000,00	(10.050.000,00)	(100,00)
8.1.2.02.05.0025	Beban Sewa Bangunan Terbuka	5.750.000,00	-	5.750.000,00	-
	Beban Pemeliharaan	142.389.179,00	134.322.136,00	8.067.043,00	6,01
8.1.2.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.499.753,00	-	17.499.753,00	-
8.1.2.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	84.990.426,00	-	84.990.426,00	-
8.1.2.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.829.000,00	-	31.829.000,00	-
8.1.2.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.070.000,00	-	2.070.000,00	-
8.1.2.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	16.250.000,00	(16.250.000,00)	(100,00)
8.1.2.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
8.1.2.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	118.072.136,00	(118.072.136,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas	2.226.546.960,00	478.931.310,00	1.747.615.650,00	364,90
8.1.2.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	823.896.960,00	341.581.310,00	482.315.650,00	141,20
8.1.2.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.401.750.000,00	137.350.000,00	1.264.400.000,00	89,51
8.1.2.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	900.000,00	-	900.000,00	-
8.1.2.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-	-
	Beban Perjalanan Dinas dana BLUD - LO				
	Beban Perjalanan Dinas dana BOS - LO				
	Beban Hibah	565.180.755,00	1.495.847.685,20	(930.666.930,20)	(62,22)
8.1.5.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Penundang-Undangan	-	-	-	-
8.1.5.05.01.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Penundang-Undangan	-	-	-	-
8.1.5.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	-

Kode Akun	URAIAN	2021	2020 (AUDITED)	Kenaikana/Penurunan	%
8.1.5.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
8.1.5.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	565.180.755,00			
8.1.5.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik				
	Beban Bantuan Sosial		17.754.600.000,00		
	Belanja Tidak Terduga - LO	-	-	-	-
	Beban Penyisihan				
	Beban Penyisihan Piutang Pajak				
8.1.7.02.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi				
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan				
	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
	Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah pusat				
	Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya				
	Beban Penyisihan Piutang Lainnya				
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		-	-	-
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		-	-	-
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		-	-	-
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-
	Beban Penyusutan Aset Tetap	437.099.226,00	346.790.570,00	90.308.656,00	
8.2.1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	384.942.904,00			
8.2.2	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	52.156.322,00			
8.2.3	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan				
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
	Beban Penyusutan Aset Lain- Lain				
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	57.464.017,85	145.981.451,98	(88.517.434,13)	
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
	Beban Transfer				
8.3.1.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa				
8.3.1.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				
8.3.2.05.01.0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa				
	Beban Lain-lain	58.330.000,00			
	Beban Lain-lain	58.330.000,00			
9.1.2	JUMLAH BEBAN	9.056.370.522,85	27.839.765.092,18	(18.783.394.569,33)	(67,47)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.350.027.721,85)	(26.259.939.824,98)	17.909.912.103,13	(68,20)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	-
	Serplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.350.027.721,85)	(26.259.939.824,98)	17.909.912.103,13	(68,20)

Pulau Punjung, 31 Desember 2021

PENGUNA ANGGARAN





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

Urusan Pemerintahan : 01. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 01.06. Sosial
Unit Organisasi : 1.06.1.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.06.1.06.01.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

KODE AKUN	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	706.342.801,00	1.579.825.267,20	873.482.466,20	-
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	-
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	-	-
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-	-
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-	-
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-	-	-
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	-	-	-	-
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	-	-	-	-
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-	-	-
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	-
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	706.342.801,00	1.579.825.267,20	873.482.466,20	-
8.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	636.342.801,00	1.579.825.267,20	943.482.466,20	-
8.3.2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	-
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	-	-	-	-
	BEBAN	8.998.040.522,85	27.839.765.092,18	(18.841.724.569,33)	(67,68)
8.1.1.01	Beban Pegawai - LO	2.471.559.223,00	3.807.912.415,00	(1.336.353.192,00)	(35,09)
8.1.2.01	Beban Persediaan - LO	1.261.078.028,00	1.436.636.712,00	(175.558.684,00)	(12,22)
8.1.2.02	Beban Jasa - LO	1.828.973.134,00	2.196.692.812,00	(367.719.678,00)	(16,74)
8.1.2.02	Beban Sewa - LO	7.750.000,00	42.050.000,00	(34.300.000,00)	(81,57)
8.1.2.03	Beban Pemeliharaan - LO	142.389.179,00	134.322.136,00	8.067.043,00	6,01
8.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas - LO	2.226.546.960,00	478.931.310,00	1.747.615.650,00	364,90
	Beban sosial		17.754.600.000,00	(17.754.600.000,00)	(100,00)
	Beban Hibah	565.180.755,00	1.495.847.685,20	(930.666.930,20)	(62,22)
	Belanja Tidak Terduga - LO	-	-	-	-
8.1.7.02.02.0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
8.2.1.02.01.0009	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
8.2.1.04.01.0010	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
8.2.1.05.01.0005	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
8.2.1.06.02.0011	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	437.099.226,00	346.790.570,00	90.308.656,00	26,04
8.2.1.10.01.0003	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	57.464.017,85	145.981.451,98	(88.517.434,13)	(60,64)
8.2.2.01.01.0037	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.291.697.721,85)	(26.259.939.824,98)	17.968.242.103,13	(68,42)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-

KODE AKUN	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8.291.697.721,85)	(26.259.939.824,98)	17.968.242.103,13	(68,42)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.291.697.721,85)	(26.259.939.824,98)	17.968.242.103,13	(68,42)

Pulau Punjung, 31 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN



BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Urusan Pemerintahan : 01.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 01.06.	Sosial
Unit Organisasi : 1.06.1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.06.1.06.01.0 1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

URAIAN	2021	2020 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
Piutang Retribusi Netto	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Piutang Lain-lain PAD	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto	0,00	0,00
Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Piutang Lainnya Netto	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Persediaan	734.914.805,00	116.999.899,00
JUMLAH ASET LANCAR	734.914.805,00	116.999.899,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Non Permanen		
Penyisihan Non Permanen	0,00	0,00

URAIAN	2021	2020 (AUDITED)
JUMLAH Penyisihan Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP	3.884.379.481,00	3.294.118.707,00
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.143.630.830,00	3.606.360.830,00
Gedung dan Bangunan	2.858.959.768,00	2.368.869.768,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.118.211.117,00)	(2.681.111.891,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.884.379.481,00	3.294.118.707,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.587.630.663,00	1.587.630.663,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.479.372.536,00)	(1.421.908.518,15)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan	108.258.127,00	165.722.144,85
JUMLAH ASET LAINNYA	108.258.127,00	165.722.144,85
JUMLAH ASET	4.727.552.413,00	3.576.840.750,85
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	4.727.552.413,00	3.576.840.750,84
JUMLAH EKUITAS	4.727.552.413,00	3.576.840.750,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.727.552.413,00	3.576.840.750,84

Pulau Punjung, 31 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN



BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002



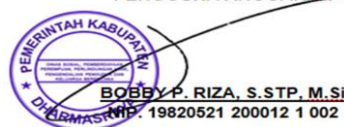
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan	: 01.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 01.06.	Sosial
Unit Organisasi	: 1.06.1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi	: 1.06.1.06.01.0 1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

URAIAN	2021	2020 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	3.576.840.750,85	4.201.378.273,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.350.027.721,85)	(26.259.939.824,98)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN:		
DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR:	436.740.960,00	16.630.879.317,82
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
LAIN-LAIN	436.740.960,00	16.630.879.317,82
Koreksi Kurang penyusutan		(35.130.333,00)
Mutasi tambah honor pokja ULP menjadi aset	2.760.000,00	2.760.000,00
Belanja Modal Menjadi aset Ekstrakomptabel		-
Koreksi Persediaan Kurang catat tahun sebelumnya	433.980.960,00	
Aset Ekstra menjadi Intra	-	-
Mutasi masuk dan keluar aset tetap antar SKPD	-	-
Mutasi masuk dan keluar aset tetap JIJ antar SKPD	-	-
Mutasi tambah aset lain-lain (aset yang dipinjamkan/mobil GOW)		
Mutasi tambah aset tetap (gedung rumah dinas Kec. P.Punjung		174.200.000,00
Koreksi Penambahan Penyusutan Aset Lain lain		
Koreksi ekuitas saldo awal - atas Penambahan penyusutan aset lain-lain yang belum tercatat		(1.275.927.066,18)
Reklas Hibah ke Masyarakat	-	-
Penghapusan aset Peralatan dan Mesin	-	-
Penghapusan aset Gedung	-	-
Belanja Modal Menjadi Aset Ekstrakomptabel		(2.100.000,00)
Belanja Modal menjadi barang dan jasa (habis pakai)		(250.000,00)
Koreksi pengurangan penyusutan aset		
Belanja BTT Covid19 (belanja dari PPKD)		17.754.600.000,00
Koreksi penambahan persediaan obat-obatan dari Sumbangan dari Pihak ke tiga pada Dinas Sosial Rp12.726.717,00		12.726.717,00
Koreksi pencatatan aset lain-lain	-	-
Penyisihan piutang retribusi	-	-
RK SKPD		
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.063.998.424,00	9.004.522.985,00
EKUITAS AKHIR	4.727.552.413,00	3.576.840.750,84

Pulau Punjung, 31 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Informasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut.

1. mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Memenuhi ketentuan dimaksud, maka Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam satu kesatuan laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2021 sehingga dapat dievaluasi dan dinilai kinerjanya oleh *stake holder*, dan tujuan secara umum adalah memberikan informasi dalam rangka :

1. Pembuatan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Informasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang berhubungan dengan anggaran/keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang;
3. Melaporkan realisasi pendapatan dan belanja serta kinerja keuangan daerah selama periode tahun 2021;
4. Menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya, dalam satu tahun anggaran;
5. Memonitor kinerja, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan;
6. Perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain: untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satker sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya dengan kinerja unit pemerintahan, mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
20. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan serta menghindari kesalahpahaman dan multitafsir dalam memahami laporan maka Laporan Keuangan Inspektorat harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pengungkapan hal-hal penting yang diperlukan dalam penyajian Laporan Keuangan, dimana secara umum bertujuan untuk :

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Untuk lebih mudah memahami Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, maka CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program.
- Bab III : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- Bab IV : Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.
- Bab V : Penutup.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 dengan Target dan Realisasi sebagai berikut.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2021

URAIAN	APBD TA. 2021	REALISASI
Pendapatan	0,00	0,00
Belanja	9.226.434.950,00	9.063.998.424,00
Surplus/Defisit	(9.226.434.950,00)	(9.063.998.424,00)

Persentase Target dan Realisasi capaian keuangan sebagaimana Tabel 2.1 di atas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat di Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Target Pencapaian Kinerja Anggaran Belanja pada DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya
Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	3	4	5	7	8
1	Belanja Tak langsung	2.439.251.000,00	2.358.009.223,00	81.241.777,00	96,67
	Belanja Pegawai	2.439.251.000,00	2.358.009.223,00	81.241.777,00	96,67
	Belanja langsung	6.787.183.950,00	6.705.989.201,00	81.194.749,00	98,80
	Belanja Pegawai	118.950.000,00	113.550.000,00	5.400.000,00	95,46
	Belanja Barang dan Jasa	5.570.533.950,00	5.509.509.201,00	61.024.749,00	98,90
	Belanja Modal	1.097.700.000,00	1.082.930.000,00	14.770.000,00	98,65

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum, pelaksanaan masing masing program dan kegiatan berjalan lancar, ini dapat terlihat dalam target pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021, untuk belanja langsung capaian kinerjanya sebesar 98,80% sedangkan belanja tidak langsung mencapai angka 96,67% sehingga secara keseluruhan capaian kinerja keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 98,24%.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

III.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Bahwa dengan adanya tambahan dana transfer dari pusat dan usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah, maka dilakukanlah pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

III.A.1. PENDAPATAN DAERAH

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki pendapatan yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2021.

III.A.2. BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana direncanakan Rp 9.226.434.950,00 dengan realisasi Rp 9.063.998.424,00 atau sebesar 98,24%.

Anggaran dan Realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.A.2.a. Belanja Operasi	7.981.068.424,00	8.115.183.985,00

Belanja Operasi TA 2021 direncanakan Rp 8.128.734.950,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.981.068.424,00 atau sebesar 98,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp 8.115.183.985,00 terjadi penurunan sebesar Rp 134.115.561,00 atau 1,65 %.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.A.2.a.1. Belanja Pegawai	2.471.559.223,00	3.807.912.415,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung (BL). Pada Tahun 2021 Belanja Pegawai BTL dianggarkan sebesar Rp 2.439.251.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.358.009.223,00 atau sebesar 96,67%. Belanja Pegawai BL dianggarkan sebesar Rp 118.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 113.550.000,00 atau sebesar 95,46%.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp 2.471.559.223,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp 3.807.912.415,00 terjadi penurunan sebesar Rp 1.336.353.192,00 atau 35,09%.

Belanja Pegawai Tahun 2021 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.862.314.000,00	1.801.405.333,00	96,73%	1.888.823.054
2	Tambahan Penghasilan	576.937.000,00	556.603.890,00	96,48%	898.439.361
3	Belanja Pegawai pada Belanja Langsung	118.950.000,00	113.550.000,00	95,46%	1.020.650.000
	- Belanja Honor PNS	118.950.000,00	113.550.000,00	95,46%	1.020.650.000
	- Belanja Honorarium Non PNS				
JUMLAH		2.558.201.000,00	2.471.559.223,00	96,61%	3.807.912.415

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.A.2.a.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.509.509.201,00	4.307.271.570,00

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pembelian barang maupun jasa yang digunakan untuk memperlancar operasional seluruh kegiatan yang akhirnya dapat memperlancar tugas-tugas pemerintahan.

Pada tahun ini terjadi kenaikan Belanja Barang dan Jasa disebabkan karena OPD mendapat penambahan anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga bertambah.

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.192.750,00	1.303.849.928,00	99,82%	1.455.275.312,00
2	Belanja Jasa Kantor	1.847.196.700,00	1.800.777.134,00	97,49%	2.176.796.012,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				28.000.000,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.800.000,00	7.750.000,00	99,36%	14.050.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.550.000,00	24.330.000,00	99,10%	
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.866.500,00	3.866.000,00	99,99%	19.896.800,00
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147.670.000,00	142.389.179,00	96,42%	16.250.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				118.072.136,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	2.233.258.000,00	2.226.546.960,00	99,70%	478.931.310,00
JUMLAH		5.570.533.950,00	5.509.509.201,00	98,90%	4.307.271.570,00

a. **Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp 1.303.849,928,00** sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.2.1
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan – Bakar Bakar dan Pelumas	107.039.850,00	106.576.078,00	99,57%	111.756.500,00
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	680.000,00	660.000,00	97,06%	
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.800.000,00	32.641.500,00	99,52%	1.175.000,00
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				93.199.808,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	59.037.300,00	58.750.250,00	99,51%	132.672.700,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.250.000,00	40.250.000,00	100,00%	
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.563.600,00	37.563.100,00	100,00%	441.410.700,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.998.000,00	7.990.000,00	99,90%	10.215.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	20.457.000,00	20.457.000,00	100,00%	
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.998.500,00	6.992.000,00	99,91%	1.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.960.000,00	3.939.000,00	99,47%	7.999.604,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	22.402.500,00	21.740.000,00	97,04%	
13	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	
14	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00%	8.600.000,00
15	Belanja Natura dan Pakan-Natura	484.750.000,00	484.750.000,00	100,00%	216.350.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	449.580.000,00	448.891.000,00	99,85%	250.846.000,00
17	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.476.000,00	3.450.000,00	99,25%	12.450.000,00
18	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				167.100.000,00
19	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	-
JUMLAH		1.306.192.750,00	1.303.849.928,00	99,82%	1.455.275.312,00

b. **Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 1.836.723.134,00** sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2.2
Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.700.000,00	17.300.000,00	73,00%	629.750.000
2	Honorarium Rohaniwan	450.000,00	0,00	0,00%	
3	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	
4	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	684.554.700,00	670.487.100,00	97,94%	
5	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	96.800.000,00	96.800.000,00	100,00%	1.444.078.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	543.050.000,00	543.050.000,00	100,00%	
7	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	96.800.000,00	93.600.000,00	96,69%	
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	
9	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.160.000,00	27.000.000,00	92,59%	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	80.160.000,00	80.160.000,00	100,00%	
11	Belanja Jasa Tenaga Supir	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00%	
12	Belanja Jasa Tata Rias	10.500.000,00	7.000.000,00	66,67%	
13	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	66.352.000,00	66.230.000,00	99,82%	
14	Belanja Tagihan Telepon	57.270.000,00	54.437.536,00	95,05%	46.478.784,00
15	Belanja Tagihan Listrik	79.800.000,00	70.173.648,00	87,94%	43.829.228,00
16	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				460.000,00
17	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.800.000,00	15.738.850,00	79,49%	12.200.000,00
JUMLAH		1.847.196.700,00	1.800.777.134,00	97,49%	2.176.796.012,00

c. **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 0,00** terdiri dari.

Tabel 3.2.3
Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0	28.800.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0	28.800.000,00

d. **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 7.750.000,00** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				8.750.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	5.800.000,00	5.750.000,00	99,14%	1.300.000,00
JUMLAH		7.800.000,00	7.750.000,00	99,36%	14.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. **Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar Rp 24.330.000,00** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.730.000,00	14.510.000,00	98,51%	-
2	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	9.820.000,00	9.820.000,00	100,00%	-
JUMLAH		24.550.000,00	24.330.000,00	99,10%	0,00

f. **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 3.886.000,00** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.6
Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.866.500,00	3.866.000,00	99,99%	-
2	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00		19.896.800,00
JUMLAH		3.866.500,00	3.866.000,00	99,99%	19.896.800,00

g. **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 142.389.179,00** sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.7
Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.500.000,00	17.499.753,00	100,00%	-
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000,00	84.990.426,00	94,43%	



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.000.000,00	31.829.000,00	99,47%	
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00%	
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				16.250.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.000.000,00	98,36%	-
JUMLAH		147.670.000,00	142.389.179,00	96,42%	16.250.000,00

h. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 0,00 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.8
Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00		118.072.136,00
JUMLAH		0,00	0,00		118.072.136,00

i. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.226.546.960,00 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.9
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	824.658.000,00	823.896.960,00	99,91%	341.581.310,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.406.500.000,00	1.401.750.000,00	99,66%	137.350.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.100.000,00	900.000,00	42,86%	-
JUMLAH		2.233.258.000,00	2.226.546.960,00	99,70%	478.931.310,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.A.2.b. Belanja Modal	1.082.930.000,00	889.339.000,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebesar Rp 1.802.930.000,00.

Belanja Modal dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.3
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	-
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	15.499.000,00
3	Belanja Modal Komputer Unit	203.500.000,00	199.650.000,00	98,11%	94.385.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Komputer	354.200.000,00	344.190.000,00	97,17%	
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	491.000.000,00	490.090.000,00	99,81%	-
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang				745.195.000,00
7	Belanja Modal Peralatan Mini Computer				5.460.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi				28.800.000,00
					-
JUMLAH		1.097.700.000,00	1.082.930.000,00	98,65%	889.339.000,00

a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp 40.000.000,00 sebagaimana tabel berikut

**Tabel 3.3.1
Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
JUMLAH		40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp 9.000.000,00 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.3.2
Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Mebel	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	15.499.000,00
JUMLAH		9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	15.499.000,00

c. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp 199.650.000,00 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.3.3
Realisasi Belanja Modal Komputer Unit Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Personal Computer	203.500.000,00	199.650.000,00	98,11	94.385.000,00
JUMLAH		203.500.000,00	199.650.000,00	98,11	94.385.000,00

d. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp 344.190.000,00 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.3.4
Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	354.200.000,00	344.190.000,00	97,17	-
JUMLAH					-

e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp 490.090.000,00 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.3.5
Realisasi Belanja Modal bangunan dan Gedung Kantor Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	491.000.000,00	490.090.000,00	99,81	-
JUMLAH		491.000.000,00	490.090.000,00	99,81	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

III.A.4. Surplus/(Defisit)

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar (Rp 9.063.998.424,00) sedangkan pada Tahun 2020 defisit sebesar (Rp 9.004.522.985,00).

III.B. LAPORAN OPERASIONAL

III.B.1. Pendapatan – LO Rp 706.342.801,00

Pendapatan LO Tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar Rp. 706.342.801,00. Pendapatan diperoleh dari pendapatan hibah dari pihak lain yang masuk ke pemerintah daerah dan masih ada persediaan pada dinas.

Tabel 3.4
Pendapatan yang diperoleh dari Dana Hibah Tahun 2021

NO	Nama Pemberi Sumbangan	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Sumbangan	Qty	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	BKKBN Provinsi Sumatera Barat	03/KU903/J.1/1/2021 Tanggal 4 Februari 2021	syringe 3 ml	200	set	894	178.800,00
			povidone iodine 30 ml	15	buah	3.190	47.850,00
			Masker	200	buah	2.730	546.000,00
			Sarung Tangan	200	psg	7.900	1.580.000,00
			Duk steril	200	buah	7.163	1.432.600,00
			Lidocain injeksi	210	ampul	1.205	253.050,00
			Asam mefenamat	2.000	box	260	520.000,00
			suntik KB	500	buah	1.210	605.000,00
			Testpack	300	box	1.995	598.500,00
			Alkohol swab	200	box	104	20.800,00
			suntik	500	vial	6.090	3.045.000,00
			DERMAFIX	200	buah	1.710	342.000,00
			Pil KB kombinasi	2.000	cyle	1.350	2.700.000,00
			Amoxicilin	2.000	box	253	506.000,00
			implant	200	box	180.000	36.000.000,00
						48.375.600,00	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	BKKBN Provinsi Sumatera Barat	002/KU- 903/J.1/III/202 1 Tanggal 18 Maret 2021	Testpack	700,0		1.995	1.396.500,00
			IUD coper	100,0		12.500	1.250.000,00
			implant	600,0		180.000	108.000.000,00
			amoksilin	4.800,0		253	1.214.400,00
			amoksilin	2.200,0		253	556.600,00
			Lidocain injeksi	300,0		1.205	361.500,00
			Lidocain injeksi	300,0		1.289	386.700,00
			duksteril	600,0		7.163	4.297.800,00
			Sarung Tangan	600,0		7.900	4.740.000,00
			masker	600,0		2.730	1.638.000,00
			syringe 3 ml	600,0		894	536.400,00
			povidone iodine 30 ml	50,0		3.190	159.500,00
			Asam mefenamat	6.000,0		260	1.560.000,00
			kasa steril	5,0		7.537	37.685,00
			plester steril	600,0		1.710	1.026.000,00
			alcohol swab	600,0		104	62.400,00
							127.223.485,00
3	BKKBN Provinsi Sumatera Barat	005/KU- 903/J.1/VI/202 1 Tanggal 14 Juni 2021	suntikan	500,0		6.090	3.045.000,00
			implant	600,0		157.485	94.491.000,00
			amoksilin	6.000,0		253	1.518.000,00
			syringe 3 ml	500,0		1.210	605.000,00
			duk steril	600,0		7.163	4.297.800,00
			safety box	25,0		20.680	517.000,00
			syringe 3 ml	600,0		894	536.400,00
			povidone iodine 30 ml	50,0		3.190	159.500,00
			Asam mefenamat	6.000,0		111	666.000,00
			cairan	4,0		66.000	264.000,00
			plester steril	600,0		1.710	1.026.000,00
			alcohol swab	600,0		104	62.400,00
			Pil KB kombinasi	2.000,0		1.350	2.700.000,00
							109.888.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat	NO: 360/ 017/ LJS/PSKB- A/2021	makanan siap saji (Rendang)	12,0	Paket	Rp 76.503	918.036,00
			makanan siap saji (Ayam Balado)	12,0	Paket	Rp 76.503	918.036,00
			makanan siap saji (Gulai Ikan)	12,0	Paket	Rp 76.503	918.036,00
			makanan siap saji (Ayam Asam Manis)	12,0	Paket	Rp 76.503	918.036,00
			makanan siap saji (Gudeg)	12,0	Paket	Rp 76.503	918.036,00
			makanan anak	80,0	Paket	Rp 71.251	5.700.080,00
			Matras	20,0	lembar	Rp 113.100	2.262.000,00
			kasur	10,0	lembar	Rp 426.500	4.265.000,00
			selimut	20,0	lembar	Rp 93.500	1.870.000,00
			family kit	15,0	paket	Rp 400.983	6.014.745,00
			kid ware	15,0	paket	Rp 468.050	7.020.750,00
			foodware	10,0	paket	Rp 389.235	3.892.350,00
			peralatan dapur keluarga	5,0	paket	Rp 347.629	1.738.145,00
5	BKKBN Provinsi Sumatera Barat	016/KU- 903/J.3/VIII/20 21 Tanggal 31 Agustus 2021	syringe 3 ml	2.800,0		1.138	3.186.400,00
			safety box	75,0		20.680	1.551.000,00
			Masker	300,0		2.730	819.000,00
			Sarung Tangan	700,0		12.500	8.750.000,00
			Duk steril	400,0		6.450	2.579.996,00
			Lidocain injeksi	1.000,0		891	891.000,00
			Asam mefenamat	4.000,0		111	444.000,00
			mini pil	2.000,0		4.015	8.030.000,00
			Testpack	300,0		1.995	598.500,00
			Alkohol swab	300,0		115	34.500,00
			suntik	5.000,0		4.825	24.125.000,00
			DERMAFIX	300,0		1.710	513.000,00
			suntik kb	5.000,0		880	4.400.000,00
			Amoxicilin	4.000,0		211	844.000,00
implant	400,0	Bks	157.485	62.994.000,00			
						119.760.396,00	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6	BKKBN Provinsi Sumatera Barat	007/KU- 903/J.3/IX/202 1 Tanggal 28 September 2021	implant	1.000,0		157.485	157.485.000,00
			Pil KB kombinasi	2.000,0		1.350	2.700.000,00
			suntikan 1 cc	1.000,0		4.825	4.825.000,00
			duk steril	1.000,0		6.450	6.449.990,00
			Lidocain injeksi	1.000,0		891	891.000,00
			masker	1.000,0		871	870.980,00
			Asam mefenamat	10.000,0		111	1.110.000,00
			Sarung Tangan	1.000,0		12.500	12.500.000,00
			safety box	25,0		20.680	517.000,00
			alcohol swab	1.000,0		115	115.000,00
			DERMAFIX	1.000,0		1.710	1.710.000,00
			syringe 3 ml	1.000,0		1.138	1.138.000,00
			syringe 3 ml (suntik)	500,0		880	440.000,00
			syringe 1 ml	1.000,0		880	880.000,00
Amoxicilin	10.000,0		211	2.110.000,00			
						193.741.970,00	
7	PT INCASI RAYA GROUP	460/707/BAST /SOSP3APPK B/2021 Tanggal 12 November 2021	beras	5.000	kg	14.000	70.000.000,00
JUMLAH						706.342.801,00	

Pendapatan- LO pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya diperoleh dari sumbangan dari pihak ke tiga yakni dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat berupa obat-obatan, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berupa logistik, peralatan penanggulangan bencana dan yang terakhir dari PT Incasi Raya Group berupa beras yang di salurkan ke masyarakat Dharmasraya yang membutuhkan. Dimana pendapatan ini dikategorikan dalam 2 (dua) kategori yakni pendapatan dari pemerintah sebesar Rp. 636.342.801,00 dan pendapatan hibah dari organisasi/lembaga swasta dalam negeri sebesar Rp. 70.000.000,00

II.B.2. Beban

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	BEBAN	8.998.040.522,85	27.839.765.092,18	(18.841.724.569,33)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp 18.841.724.569,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5
Beban Operasional Tahun 2021 dan 2020

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.	BEBAN			
8.1.1.01	Beban Pegawai - LO	2.471.559.223,00	3.807.912.415,00	(1.336.353.192,00)
8.1.2.01	Beban Persediaan - LO	1.261.078.028,00	1.436.636.712,00	(175.558.684,00)
8.1.2.02	Beban Jasa - LO	1.828.973.134,00	2.196.692.812,00	(367.719.678,00)
8.1.2.02	Beban Sewa - LO	7.750.000,00	42.050.000,00	(34.300.000,00)
8.1.2.03	Beban Pemeliharaan - LO	142.389.179,00	134.322.136,00	8.067.043,00
8.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas - LO	2.226.546.960,00	478.931.310,00	1.747.615.650,00
	Beban Bantuan Sosial		17.754.600.000,00	(17.754.600.000,00)
8.1.5.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	565.180.755,00	1.495.847.685,20	(930.666.930,20)
8.2.1.06.02.0011	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	437.099.226,00	346.790.570,00	90.308.656,00
8.2.1.10.01.0003	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	57.464.017,85	145.981.451,98	(88.517.434,13)
	JUMLAH	8.998.040.522,85	27.839.765.092,18	18.841.724.569,33

a. Beban Pegawai

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.1.01	Beban Pegawai	2.471.559.223,00	3.807.912.415,00	(1.336.353.192,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp 1.336.353.192,00 yang dipengaruhi antara lain oleh refocusing anggaran.

Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Honorarium Non PNS, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.5.1
Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2021 dan 2020

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.	BEBAN			
8.1.1.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.312.582.600,00	1.888.823.054,00	(576.240.454,00)
8.1.1.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	115.430.272,00		115.430.272,00
8.1.1.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	193.010.000,00		193.010.000,00
8.1.1.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.050.000,00		19.050.000,00
8.1.1.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	72.709.680,00		72.709.680,00
8.1.1.01.08.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.397.303,00		2.397.303,00
8.1.1.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	20.082,00		20.082,00
8.1.1.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	74.575.829,00		74.575.829,00
8.1.1.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.911.920,00		1.911.920,00
8.1.1.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	5.735.820,00		5.735.820,00
8.1.1.01.12.0001	Beban luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.981.827,00		3.981.827,00
8.1.1.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	556.603.890,00	898.439.361,00	(341.835.471,00)
8.1.1.03.07.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.550.000,00	1.020.650.000,00	(907.100.000,00)
	JUMLAH	2.471.559.223,00	3.807.912.415,00	(1.336.353.192,00)

Saldo Beban Pegawai tersebut adalah jumlah *netto* setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama Tahun 2021. Untuk beban pegawai tidak ada perbedaan dari beban LO dan LRA.

Tabel 3.5.2
Perbedaan Belanja Pegawai Antara LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Belanja-LO	Selisih +/-
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BEBAN PEGAWAI	2.471.559.223,00	2.471.559.223,00	0
Beban Gaji Pokok PNS	1.312.582.600,00	1.312.582.600,00	0



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Tunjangan Keluarga PNS	115.430.272,00	115.430.272,00	0
Beban Tunjangan Jabatan PNS	193.010.000,00	193.010.000,00	0
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.050.000,00	19.050.000,00	0
Beban Tunjangan Beras PNS	72.709.680,00	72.709.680,00	0
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.397.303,00	2.397.303,00	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.082,00	20.082,00	0
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	74.575.829,00	74.575.829,00	0
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.911.920,00	1.911.920,00	0
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.735.820,00	5.735.820,00	0
Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.981.827,00	3.981.827,00	0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	556.603.890,00	556.603.890,00	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.550.000,00	113.550.000,00	0

b. Beban Persediaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.01	Beban Persediaan	1.261.078.028,00	1.436.636.712,00	(175.558.684,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan dalam Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp (175.558.684,00). Beban Persediaan dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel 3.5.3
Rincian Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2021 dan 2020

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.1.2.01	Beban Persediaan			
8.1.2.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	106.576.078,00	111.756.500,00	(5.180.422,00)
8.1.2.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	660.000,00		660.000,00
8.1.2.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.306.000,00	1.175.000,00	8.131.000,00
8.1.2.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel		93.199.808,00	(93.199.808,00)
8.1.2.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.010.250,00	133.093.700,00	(74.083.450,00)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8.1.2.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.000.000,00		40.000.000,00
8.1.2.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.900.350,00	441.344.450,00	(403.444.100,00)
8.1.2.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.054.000,00	10.146.000,00	(2.092.000,00)
8.1.2.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.457.000,00		20.457.000,00
8.1.2.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.992.000,00	1.500.000,00	5.492.000,00
8.1.2.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.939.000,00	7.999.604,00	(4.060.604,00)
8.1.2.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.740.000,00		21.740.000,00
8.1.2.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	3.659.500,00		3.659.500,00
8.1.2.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.200.000,00		15.200.000,00
8.1.2.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	471.242.850,00	206.025.650,00	265.217.200,00
8.1.2.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	448.891.000,00	250.846.000,00	198.045.000,00
8.1.2.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.450.000,00	12.450.000,00	(9.000.000,00)
8.1.2.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		167.100.000,00	(167.100.000,00)
8.1.2.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.000.000,00		
JUMLAH		1.261.078.028,00	1.436.636.712,00	(175.558.684,00)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 3.5.4
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan	1.303.849.928,00	1.261.078.028,00	42.771.900,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	106.576.078,00	106.576.078,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	660.000,00	660.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	32.641.500,00	9.306.000,00	23.335.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.750.250,00	59.010.250,00	-260.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.250.000,00	40.000.000,00	250.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.563.100,00	37.900.350,00	-337.250,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.990.000,00	8.054.000,00	-64.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.457.000,00	20.457.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.992.000,00	6.992.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.939.000,00	3.939.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	21.740.000,00	21.740.000,00	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat	10.000.000,00	3.659.500,00	6.340.500,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	484.750.000,00	471.242.850,00	13.507.150,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	448.891.000,00	448.891.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp 42.771.900,00.

c. Beban Jasa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.02	Beban Jasa	1.828.973.134,00	2.196.692.812,00	(367.719.678,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp (367.719.678,00). Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel.3.5.5
Perbedaan Beban Jasa antara LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa	1.828.973.134,00	1.828.973.134,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00
Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	670.487.100,00	670.487.100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	543.050.000,00	543.050.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	80.160.000,00	80.160.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
Belanja Jasa Tata Rias	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	66.230.000,00	66.230.000,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	54.437.536,00	54.437.536,00	0,00
Belanja Tagihan Listrik	70.173.648,00	70.173.648,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.738.850,00	15.738.850,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.866.000,00	3.866.000,00	0,00

d. Beban Sewa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8 . 1 . 2 . 02	Beban Sewa	7.750.000,00	42.050.000,00	(34.300.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp (34.300.000,00). Beban sewa tahun ini terdiri dari beban sewa bangunan gedung kantor dan beban sewa bangunan terbuka.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5.6
Perbedaan Belanja Beban Sewa LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan	7.750.000,00	7.750.000,00	0
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	5.750.000,00	5.750.000,00	0

e. Beban Pemeliharaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.03	Beban Pemeliharaan	142.389.179,00	134.322.136,00	8.067.043,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar Rp 8.067.043,00. Untuk beban pemeliharaan-LRA dengan Beban pemeliharaan-LO tidak ada pebedaannya dan dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel 3.5.7
Perbedaan Beban Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan	142.389.179,00	142.389.179,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.499.753,00	17.499.753,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	84.990.426,00	84.990.426,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.829.000,00	31.829.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

f. Beban Perjalanan Dinas

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas	2.226.546.960,00	478.931.310,00	1.747.615.650,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar Rp 1.747.615.650,00. Untuk beban perjalanan dinas -LRA dengan Beban pemeliharaan-LO tidak ada pebedaannya dan dapat dilihat dari table berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.5.8

Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Perjalanan Dinas	2.226.546.960,00	2.226.546.960,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	823.896.960,00	823.896.960,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.401.750.000,00	1.401.750.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00

g. Beban Hibah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
	Beban Hibah	565.180.755,00	0,00	565.180.755,00

Jumlah tersebut merupakan saldo beban hibah tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar Rp 565.180.755,00. Untuk beban hibah masuk pada jenis beban hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

h. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.2.1.06.02.0011	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	437.099.266,00	346.790.570,00	90.308.656,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 90.308.656,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

Tabel 3.5.8

Perbedaan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyusutan	437.099.226,00	346.790.570,00	90.308.656,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	437.099.226,00	346.790.570,00	90.308.656,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Beban Penyusutan Amorisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-

Beban Penyusutan untuk aset tetap lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015.

II.B.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp (8.291.697.721,85) merupakan surplus dari Pendapatan sebesar Rp 706.342.801,00 dikurangi Beban Operasi sebesar Rp 8.998.040.522,85.

II.B.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 0,00.

II.B.5. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

II.B.6. Surplus/Defisit LO

Surplus Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (8.291.697.721,85) merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp (8.291.697.721,85) dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 0,00 setelah Pengurangan beban transfer atas reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban Tak Terduga ke Beban Luar Biasa sebesar Rp 0,00.

Surplus Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp (8.291.697.721,85) mengalami penurunan sebesar Rp 17.968.242.103,13 bila dibandingkan dengan Surplus Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp (26.259.939.824,98).

III.C. NERACA

III.C.1. ASET

Neraca Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya menggambarkan posisi keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Neraca Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 memiliki Aset sebesar Rp 4.727.552.413,00, Kewajiban sebesar Rp 0,00 dan Ekuitas sebesar Rp 4.727.552.413,00.

Total Aset Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.727.552.413,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.150.711.662,15 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.576.840.750,84 atau 32,17%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.C.1.a. Aset Lancar	734.914.805,00	116.999.899,00

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 734.914.805,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 617.914.906,00 atau 528,13% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 116.998.899,00. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Aset Lancar		Tahun 2021	Tahun 2020
a.	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
d.	Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
e.	Persediaan	734.914.805,00	118.999.899,00
	Jumlah	734.914.805,00	118.999.899,00

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.C.1.a.1 Kas di Kas Daerah	0,00	0,00

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan yakni Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening nomor 1403.0101.0028.4-2, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung Nomor 900/362/DPPKD-2012 dan Nomor PKS/001/PL/DIR06-2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp 0,00 atau nihil.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.C.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang belum disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir periode pembukuan. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp 0,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.C.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.C.1.a.4 Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 tidak memiliki Belanja Dibayar Dimuka.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
III.C.1.a.5 Persediaan	734.914.805,00	116.999.899,00

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.6.1
Persediaan Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Persediaan Bahan Habis Pakai			
1	Alat Tulis Kantor	660.000,00	920.000,00
2	Kertas Cover	250.000,00	
3	Barang Cetak		337.250,00
4	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	50.000,00	114.000,00
5	Bahan Material Makanan	25.037.500,00	11.530.350,00
6	Obat-obatan	6.340.500,00	
7	Barang yang diserahkan ke masyarakat	23.335.500,00	
8	Hibah Obat-obatan	296.781.653,00	93687099
9	Hibah Penanggulangan bencana	6.508.630,00	10.411.200,00
10	Hibah penanggulangan bencana	375.951.022,00	
Jumlah		734.914.805,00	116.999.899,00

III.C.1.b. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2021 dan saldo per 31 Desember 2020 dirinci sebagaimana tabel berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
ASET TETAP		
a. Tanah	0,00	0,00
b. Peralatan dan Mesin	4.143.630.830,00	3.606.360.830,00
c. Gedung dan Bangunan	2.858.959.768,00	2.368.869.768,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.118.211.117,00)	(2.681.111.891,00)
Nilai Buku Aset Tetap	3.884.379.481,00	3.294.118.707,00

Dari tabel diatas jika dibandingkan nilai Aset tetap per 31 Desember 2021 dengan nilai Aset tetap per 31 Desember 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp 590.260.774.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 3.7
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Berdasarkan Jenis Aset Tetap**

KIB/Sub KIB	Permendagri Nomor 17 Tahun 2007			
	Saldo Aset Tetap Tahun 2020	Penambahan Aset Tetap Tahun 2021	Pengurangan Aset Tetap Tahun 2021	Saldo Aset Tetap Tahun 2021
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin				
Peralatan dan Mesin				
Peralatan dan Mesin	3.606.360.830,00	537.270.000,00		4.143.630.830,00
Alat Alat Besar				
Alat Angkutan	2.614.756.800,00			2.614.756.800,00
Alat Kantor/RT	234.215.023,00	79.000.000,00		313.215.023,00
Alat-alat Studio dan Komunikasi	189.740.000,00	122.760.000,00		312.500.000,00
Alat-alat Laboratorium	2.000.000,00			2.000.000,00
KOMPUTER				
Alat-Alat Pertanian/ Peternakan				
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung	2.368.869.768,00	490.090.000,00		2.858.959.768,00
Bangunan Gedung	2.057.911.577,00	490.090.000,00		2.548.001.577,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	310.958.191,00			
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/irigasi				
Instalasi				
Jaringan				
Aset Tetap Lainnya				
Aset Tetap Lainnya	5.975.230.598,00	1.027.360.000,00		7.002.590.598,00
Buku Perpustakaan				
KDP				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.681.111.891,00	437.099.226,00		3.118.211.117,00
Nilai Buku	3.294.118.707,00	590.260.774,00	0,00	3.884.379.481,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2021 terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.7.1
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2021**

Saldo 31 Desember 2020		5.975.230.598,00
Penambahan 2021		1.027.360.000,00
1	Belanja Modal Menjadi Aset	1.024.600.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	0,00
3	Honor Pokja Menjadi Aset	2.760.000,00
4	Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	0,00
5	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	0,00
Pengurangan 2021		0,00
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	0,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	0,00
4	Pengurangan Koreksi Pencatatan	0,00
5	Lelang dan Penjualan	0,00
6	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	0,00
7	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	0,00
Saldo 31 Desember 2021		7.002.590.598,00
Penambahan/Pengurangan Koreksi Aset Tetap		0,00
Saldo Aset Tetap 2021		7.002.590.598,00

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7.2
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021

Akumulasi Penyusutan 2020		2.681.111.891,00
Penambahan Penyusutan 2021		437.099.226,00
1	Penambahan Penyusutan pindah SKPD	0,00
2	Penambahan Penyusutan Koreksi	0,00
3	Penyusutan Semester I	194.905.861,00
4	Penyusutan Semester II	242.193.365,00
Pengurangan Penyusutan 2021		0,00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar SKPD	0,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	0,00
3	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	0,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	0,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021		3.118.211.117,00
Nilai Buku 31 Desember 2021		3.118.211.117,00

Rincian Aset Tetap menurut Jenis dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

III.C.1.b.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Tanah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah nihil.

III.C.1.b.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (capilization trheshold) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu Rp 1.000.000,00.

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 terlihat sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Peralatan dan Mesin	4.143.630.830,00	3.606.360.830,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan	(2.754.446.151,00)	(2.369.503.247,00)
Nilai Buku	1.389.184.679,00	1.236.857.583,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 537.270.000,00.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Sub KIB Peralatan Mesin		
Alat Besar		0,00
Alat Angkut	2.614.756.800,00	2.614.756.800,00
Alat Kantor/RT	313.215.023,00	234.215.023,00
Alat Studio	312.500.000,00	189.740.000,00
Alat Laboratorium	2.000.000,00	2.000.000,00
Komputer	901.159.007,00	565.649.007,00
Alat-Alat Pertanian/Peternakan		-
Akumulasi Penyusutan	(2.754.446.151,00)	(2.369.503.247,00)
Nilai Buku	1.389.184.679,00	1.236.857.583,00

Rincian penambahan, pengurangan dan koreksi penambahan/pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Inspektorat Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021.

Tabel 3.7.3
Penambahan, Pengurangan dan Koreksi Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020	Penambahan/ Pengurangan Reklas	Saldo 31 Desember 2021
08	DINSOSP3 APPKB	3.606.360.830,00	537.270.000,00	0,00	3.606.360.830,00	0,00	4.143.630.830,00

Rincian nilai buku aset tetap peralatan mesin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7.4
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2021

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2020	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Nilai Buku 31 Desember 2021
08	DINSOSP3AP PKB	3.606.360.830,00	2.369.503.247,00	384.942.904,00		2.754.446.151,00	1.389.184.679,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tabel di bawah ini dapat dijelaskan penambahan dan pengurangan nilai aset tetap peralatan mesin sehingga menghasilkan saldo aset tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.7.5
Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020		3.606.360.830,00
Penambahan Peralatan dan Mesin		537.270.000,00
1	Belanja Modal Menjadi Aset	534.510.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	0,00
3	Honor Pokja Menjadi Aset	2.760.000,00
4	Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	0,00
5	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	0,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin		0,00
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	0,00
2	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	0,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	0,00
4	Pengurangan Koreksi Pencatatan	0,00
5	Lelang dan Penjualan	0,00
6	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	0,00
7	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	0,00
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021		4.143.630.830,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebesar Rp 537.270.000,00. Adapun Penambahan dan Pengurangan Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7.6
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020		2.369.503.247,00
Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021		384.942.904,00
1	Penambahan Penyusutan pindah SKPD	0,00
3	Penyusutan Semester I	171.163.314,00
4	Penyusutan Semester II	213.779.590,00
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021		0,00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar SKPD	0,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas ke Aset Lainnya	0,00
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	0,00
4	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	0,00
5	Pengurangan Penyusutan Koreksi	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021		2.754.446.151,00
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021		1.389.184.679,00

Rincian Penambahan Penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp 384.942.904,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7.7
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Asal Penambahan Penyusutan	Jumlah
1	Penyusutan Semester I	171.163.314,00
	Alat Besar	957.858,00
	Alat Angkut	114416252



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Asal Penambahan Penyusutan	Jumlah
	Alat Kantor/RT	3.197.052,00
	Alat Studio dan Komunikasi	12.309.000,00
	Alat Laboratorium	
	Komputer	41.241.010,00
	Alat-Alat Pertanian/Peternakan	
2	Penyusutan Semester II	213.779.590,00
	Alat Besar	
	Alat Angkut	110179912
	Alat Kantor/RT	12.442.053,00
	Alat Studio dan Komunikasi	18.447.000,00
	Alat Laboratorium	
	Komputer	72.710.625,00
	Alat-Alat Pertanian/Peternakan	
JUMLAH		384.942.904,00

III.C.1.b.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 20.000.000,00.

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah Rp 2.858.959.768,00 Adapun saldo Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Bangunan gedung	2.858.959.768,00	2.368.869.768,00
Monumen	0,00	0,00
Bangunan menara	0,00	0,00
Tugu titik kontrol/pasti	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(363.764.966,00)	(311.608.644,00)
Nilai Buku	2.495.194.802,00	2.057.261.124,00

Akumulasi penyusutan dan nilai buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7.8
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021**

No	SKPD	Saldo 31 Des 2020	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2020	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2021
08	DINSOSP3A PPKB	2.368.869.768,00	311.608.644,00	52.156.322,00	0,00	363.764.966,00
Jumlah		2.368.869.768,00	311.608.644,00	52.156.322,00	0,00	363.764.966,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya adalah Rp. 52.156.322,00.

Penambahan dan pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7.9
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2020		311.608.644,00
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2021		52.156.322,00
1	Penambahan Penyusutan pindah SKPD	0,00
2	Penyusutan Semester I	23.742.547,00
3	Penyusutan Semester II	28.413.775,00
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2021		0,00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar SKPD	0,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	0,00
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	0,00
4	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	0,00
5	Pengurangan Penyusutan Koreksi	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021		363.764.966,00
Nilai Buku Aset Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021		2.495.194.802,00

III.C.1.b.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan maka jalan, irigasi, dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan. Untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak diatur mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi dan disajikan berdasarkan nilai perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap tersebut. Metode penyusutannya garis lurus tidak ada nilai residu dan dihitung dengan pendekatan bulanan yang disajikan semesteran.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) tidak mengalami perubahan sebagai akibat implementasi dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah nihil.

III.C.1.b.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun saldo Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Nilai Buku	0,00	0,00

Saldo aset tetap lainnya tidak mengalami peningkatan/penurunan apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 dengan per 31 Desember 2021 yakni sebesar Rp 0,00 atau nihil.

III.C.1.b.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada I Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah nihil.

III.C.1.b.7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya memiliki nilai Aset Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp 1.587.630.663,00 adapun rinciannya sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	1.587.630.663,00	1.587.630.663,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Jumlah	1.587.630.663,00	1.587.630.663,00

III.C.1.b.7.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif. Adapun saldo aset lain-lain Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 serta per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Aset Lain-Lain	1.587.630.663,00	1.587.630.663,00
Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah	1.587.630.663,00	1.587.630.663,00

Adapun penambahan dan pengurangan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut.

Tabel 3.7.10
Aset Lain-lain DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2020	Penambahan Aset Lain-lain 2021	Pengurangan Aset Lain-lain 2021	Saldo Aset Lain-lain 2021
08	DINSOSP3APPKB	1.587.630.663,00	0,00	0,00	1.587.630.663,00
Jumlah		1.587.630.663,00	0,00	0,00	1.587.630.663,00

Adapun penyusutan dan nilai buku aset lain-lain 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.7.11
Nilai Buku Aset Lain-lain DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2021	Akumulasi Penyusutan 2020	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2021	Nilai Buku Aset Lain-lain 2021
08	DINSOSP3APPKB	1.587.630.663,00	1.421.908.518,15	57.464.017,85	0,00	1.479.372.536,00	108.258.127,00
Jumlah		1.587.630.663,00	1.421.908.518,15	57.464.017,85	0,00	1.479.372.536,00	108.258.127,00

Penambahan dan pengurangan Aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.7.12
Penambahan Pengurangan Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain 2020	1.587.630.663,00
Penambahan Aset Lain-lain 2021	0,00
1 Kurang Catat	0,00
2 Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	0,00
3 Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	0,00
Pengurangan Aset Lain-lain 2021	0,00
1 Pengurangan Mutasi Antar SKPD	0,00
2 Pengurangan Koreksi / Pencatatan	0,00
3 Lelang dan Penjualan	0,00
4 Penghapusan P3D	0,00
5 Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	0,00
Saldo Aset Lain-lain 2021	1.587.630.663,00

Tidak ada penambahan Aset Lain-lain selama tahun 2021 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.

III.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Inspektorat Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 adalah nihil.

III.D EKUITAS

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
EKUITAS	4.727.552.413,00	3.576.840.750,84

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total ekuitas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.727.552.413,00 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp 3.576.840.750,84 ditambah defisit laporan operasional sebesar Rp(8.350.027.721,85) dikurangi dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp (436.740.960,00) serta kewajiban yang harus dikonsolidasikan sebesar Rp. 9.063.998.424,00.

Ekuitas Awal	3.576.840.750,84
Surplus/Defisit LO	(8.350.027.721,85)
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	436.740.960,00
Kewajiban yang harus di konsolidasikan	9.063.998.424,00
Ekuitas Akhir	4.727.552.413,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

IV.A Gambaran Umum Satuan Perangkat Daerah

Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu instansi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, mempunyai visi yaitu.

“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”

Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, sebagai berikut :

- Peduli** : Sikap keprihatinan serta tanggap dengan keadaan dan kondisi masyarakat
- Sejahtera** : Kondisi masyarakat yang makmur, sehat dan damai
- Berbudaya** : Kondisi masyarakat memiliki nilai dan tradisi multikultural yang berkarya dan berinovasi untuk kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Untuk mencapai visi tersebut diatas Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) menetapkan **Misi** sebagai berikut :

1. Mencegah, mengatasi dan mengendalikan masalah sosial dengan memberdayakan masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Mewujudkan wanita Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian, dengan:
3. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan
5. Mengakhiri perdagangan manusia
6. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, sehat dan berkualitas.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

IV.B Susunan Satuan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi mengalami pergeseran dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya merupakan perangkat daerah tipe A.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - 1) Kasi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial
 - 2) Kasi Jaminan Sosial Keluarga
 - 3) Kasi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Kasi Kelembagaan Sosial
- 2) Kasi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial
- 3) Kasi Penanganan Fakir Miskin
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Kasi Kualitas Hidup Perempuan Keluarga, Data dan Informasi
 - 2) Kasi Pemenuhan Hak-Hak Anak
 - 3) Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - 2) Kasi Keluarga Berencana
 - 3) Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara. Sekian dan terimakasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KEPALA DINAS,



BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19820521 200012 1 002